

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Di masa Presiden Soeharto, kedudukan Etnis Cina di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat dibatasi ruang geraknya karena dianggap berbahaya, sehingga di masa ini istilah Tionghoa itu sendiri diganti menjadi Cina. Hal ini terjadi disebabkan adanya kesenjangan ekonomi antara penduduk pribumi dengan Etnis Cina. Kesenjangan ekonomi antara pribumi dengan Etnis Cina lebih dikarenakan akses yang diperoleh oleh Etnis ini pada masa Orde Baru hanyalah di bidang ekonomi. Di masa Presiden Soeharto Etnis Cina benar-benar dibuat tidak berdaya dan hanya diarahkan untuk bergerak di bidang bisnis saja, Etnis Cina diintimidasi agar menjauhi wilayah politik.

Di masa Presiden Soeharto, kedudukan Etnis Cina hanya dibatasi pada bidang ekonomi saja. Wibowo dan Ju Lan [Eds] (2010: 25), mengemukakan bahwa:

Selama 30 tahun masa pemerintahan rezim orde baru yang otoriter, akibat peraturan yang berlaku pada waktu itu, orang Tionghoa tidak dapat melakukan kegiatan apapun di bidang politik. Terjadi sebuah sikap apolitik di kalangan orang Tionghoa walaupun sikap yang sama tampak pada hampir semua kelompok orang di Indonesia. Seperti telah diungkapkan banyak pengamat, orang-orang Tionghoa mengalihkan kegiatan mereka ke bidang ekonomi, satu-satunya bidang kehidupan yang masih terbuka bagi mereka.

Perekonomian merupakan satu-satunya bidang yang terbuka bagi Etnis Cina, sehingga mereka memusatkan diri di bidang ekonomi. Tan (2008: 12) dalam bukunya mengemukakan posisi Etnis Cina di bidang Ekonomi yaitu:

With the establishment of Soeharto's New Order Regime, the economic position of Ethnic Chinese changed. In the process of economic recovery, the government adopted the policy of foreign direct investment. This gave ethnic Chinese businessmen the opportunity to form joint ventures with foreign investors, thereby greatly contributing to the development of the private sector of the economy. The crucial role of the ethnic Chinese in sustaining economic growth continued through the mid 1990's. However, at same time Soeharto's economic policies generated the emergence the "cronyism", the collusion between the political elite and big businessmen or "konglomerat" for mutual gain.

Adapun terjemahannya adalah:

Dengan pendirian Rezim Orde Baru Soeharto, posisi ekonomi Etnis China berubah. Dalam proses perbaikan ekonomi, pemerintah mengadopsi peraturan Investasi Langsung Luar Negeri. Hal ini memberikan kesempatan bagi pengusaha Etnis China untuk membentuk suatu kerjasama dengan para investor luar negeri, dengan cara demikian memiliki andil cukup besar untuk pengembangan sektor ekonomi swasta. Peran penting Etnis China menopang pertumbuhan ekonomi berlangsung hingga pertengahan 1990-an. Bagaimanapun juga, pada waktu yang bersamaan peraturan ekonomi Presiden Soeharto menyebabkan munculnya 'Kronisme', sebuah kolusi antara elit politik dan pengusaha yang dikenal dengan 'Konglomerat' untuk keuntungan bersama.

Pengusaha yang berasal dari Etnis Cina ternyata berperan penting dalam perekonomian Indonesia Di masa Presiden Soeharto. Mereka menjadi mitra dari investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri terutama di Sektor Swasta. Tidak hanya pengusaha Tionghoa saja yang berperan penting dalam perekonomian nasional, Etnis Cina yang berada dalam lingkup daerah memiliki andil di bidang ekonomi yakni perdagangan. Perdagangan yang dilakukan oleh Etnis Cina

berupa perdagangan besar maupun kecil, baik yang grosir maupun eceran. Salah satu bentuk dari kegiatan perdagangan tersebut antara lain, membuka toko mebel, toko barang kebutuhan pokok, toko bahan bangunan dan jenis toko lainnya.

Terbentuknya toko-toko yang dimiliki oleh Etnis Cina sebagai penjual berdampak pada interaksi dengan pembeli, yang merupakan masyarakat pribumi. Interaksi ini lambat laun menjadi sebuah hubungan timbal balik antara pembeli dan penjual, seperti yang diungkapkan oleh Wibowo dan Ju Lan [Eds.] (2010: 5) bahwa “hubungan warga Tionghoa dengan warga Indonesia lainnya pun dianggap sudah lebih terbuka, dan sebagian dari kecurigaan yang ada di antara mereka sudah jauh berkurang....” Namun, bentuk interaksi ini juga berarah kepada kecurigaan masyarakat pribumi kepada Etnis Cina maupun sebaliknya. Kemudian, Wibowo dan Ju Lan [Eds.] (2010: 25-26) mengemukakan bahwa:

Perlahan-lahan, mereka (warga Tionghoa) mengubah diri mereka menjadi *economic animal* yang pada gilirannya menimbulkan rasa marah di kalangan orang-orang non-Tionghoa. Sikap apolitik di kalangan orang Tionghoa telah membuat diri mereka benar-benar antipolitik, sedemikian rupa sehingga mereka menjauhi segala sesuatu yang “berbau politik”. Sikap antipolitik inilah yang kini tertanam dalam-dalam yang sulit sekali diatasi.

Sikap antipolitik Etnis Cina dan pemusatan kehidupan di bidang ekonomi membuat Etnis Cina menjadi semakin giat meningkatkan usahanya di bidang ekonomi. Hal inilah yang membuat kecemburuan bagi masyarakat pribumi, karena Etnis Cina dianggap ‘lebih kaya’ dibanding masyarakat pribumi. Sehingga interaksi yang pada awalnya dilandasi kerja sama antara penjual yakni Etnis Cina dengan masyarakat

pribumi sebagai pembeli menjadi sebuah rasa saling curiga dan benci terhadap Etnis Cina dan begitupun sebaliknya.

Kondisi saling mencurigai dan membenci antara Etnis Cina dengan masyarakat pribumi mengakibatkan suatu bentuk pertentangan. Soekanto (1990: 107) mengemukakan pendapatnya mengenai definisi pertentangan, “Pertikaian (selanjutnya disebut “pertentangan” saja) adalah suatu proses sosial yang di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.” Pertentangan di dalam masyarakat terjadi karena adanya ketimpangan, dalam kasus penelitian ini, ketimpangan antara Etnis Cina dengan Masyarakat Cikarang yang terlihat sekali perbedaannya di dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu juga, kebencian anti-Cina yang sudah ada kemudian diperparah dengan ketimpangan dalam pemenuhan dan akses kegiatan perekonomian membuat peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang pada awalnya terjadi di Ibukota Jakarta dan Kota-kota besar lainnya – juga terjadi di kota-kota lainnya termasuk Cikarang.

Kerusuhan Mei 1998 yang melanda sebagian besar wilayah di Indonesia terjadi karena kesenjangan kehidupan ekonomi antara pribumi dengan Etnis Cina menyebabkan kebencian masyarakat pribumi terhadap Etnis Cina, terutama di masa menjelang runtuhnya Pemerintahan Orde Baru ketika Krisis Ekonomi Global. Keadaan ekonomi Indonesia yang buruk akibat krisis ekonomi membuat rakyat Indonesia semakin benci akan Etnis Cina, bahkan pada puncaknya muncul sentimen anti-Tionghoa. Seperti yang diungkapkan Budianta di dalam Heryanto dan Mandal

[Eds] (2004: 319), “Banyaknya kasus perkosaan (mencapai 156 kasus), kejahatan yang sistematis, dan reaksi publik yang penuh emosi”. Sehingga, terjadi kerusuhan anti-Tionghoa, mulai dari penjarahan barang-barang di Toko-toko, perkosaan maupun pembunuhan terhadap Etnis Cina yang dilakukan oleh sekelompok orang.

Kerusuhan anti-Cina terjadi di berbagai kota di Indonesia terutama terhadap Etnis itu sendiri. Ibu Kota Jakarta, Kota-kota Besar hingga ke pelosok daerah menjadi daerah-daerah yang menjadi sasaran tempat kerusuhan. Sebagian besar wilayah yang menjadi daerah kerusuhan merupakan tempat Etnis Cina menggantungkan hidupnya di sektor perekonomian. Salah satu kota yang menjadi tempat kerusuhan anti-Tionghoa dan penjarahan barang-barang di toko-toko milik Etnis Cina adalah daerah Cikarang.

Kerusuhan di Cikarang terjadi karena ketimpangan antara masyarakat pribumi dan Etnis Cina yang disulut oleh kerusuhan yang terjadi di Ibukota Jakarta serta kota-kota besar lainnya. Ketimpangan ini terjadi di bidang perekonomian karena Etnis Cina di bidang ekonomi menguasai perdagangan, sedangkan masyarakat pribumi kalah bersaing dan bahkan hanya menjadi konsumen saja. Cikarang menjanjikan untuk kegiatan ekonomi, Industri maupun pertanian sehingga menjadi magnet bagi orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk Etnis Cina. Sehingga Etnis Cina memusatkan kegiatan perekonomiannya dengan mendirikan toko-toko di Pasar Baru Cikarang.

Pasar Baru Cikarang yang terletak di Kecamatan Cikarang merupakan saksi bisu dari kerusuhan anti-Tionghoa yang berakibat adanya penjarahan barang-barang

di toko milik Etnis Cina. Kawasan pasar ini menjadi tempat di mana Masyarakat Cikarang menjarah barang-barang di toko milik Etnis Cina, hingga melakukan perusakan dan menyebabkan kerugian.

Kerusuhan anti-Cina bukanlah pertama kali terjadi di Indonesia. Di masa Hindia-Belanda maupun Kemerdekaan terjadi sentimen anti-Tionghoa yang menyebabkan kerusuhan. Di tahun 1740, terjadi pembantaian Etnis Tionghoa (nama Tionghoa masih berlaku sebelum tahun 1967 dan Di masa Presiden Soeharto nama ini diganti menjadi Etnis Cina berdasarkan surat edaran presidium kabinet No. SE. 06/Preskab/6/1967) oleh Pemerintah Hindia-Belanda yang menyebabkan terbunuhnya 10.000 orang atau lebih Etnis Tionghoa.

Sugandi (2005: 68) juga mengemukakan kerusuhan yang terjadi di Bandung menyusul peristiwa serupa di Garut.

Peristiwa yang terjadi di Bandung pada tanggal 10 Mei 1963, pada akhirnya mendorong terciptanya berbagai peristiwa di berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk juga dan yang terjadi di Kota Garut pada tanggal 17 Mei 1963.

Sjamsuddin juga mengatakan kerusuhan terjadi dua kali dalam satu dekade, dengan pelaku dan *casus belli* yang berbeda. Sjamsuddin dalam Jurnal Historia No. 6 Vol. III, menulis mengenai Rusuh di Bandung: Peristiwa 5 Agustus 1973 dalam liputan media massa (2002: 93) sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Agustus 1973 – peristiwa pemukulan seorang kusir gerobak oleh seorang pemuda Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina pada siangnya – suatu arus massa yang marah, sepanjang malam merusak dan membakar harta-harta serta mengancam keselamatan dan jiwa orang-orang

dan/atau keturunan Cina – peristiwa itu telah menelan korban jiwa serta benda-benda seharga Rp. 1 Miliar.

Sebenarnya, yang menjadi pemicu peristiwa di Bandung ini diawali oleh insiden kecil antara tukang becak dengan seorang warga keturunan Cina yang kemudian meluas menjadi kerusuhan anti-Cina (Yogaswara, 2009: 46). Aksi kerusuhan ini seperti menunjukkan bahwa adanya ketimpangan kaum pribumi yang miskin dengan Etnis Cina yang dianggap kaum yang menikmati hasil pembangunan dan kaya. Kecemburuan ini yang menjadi penyebab sentimen Anti-Cina Di masa Presiden Soeharto yang menyebabkan kerusuhan dan menyebar di berbagai daerah lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini. Sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab timbulnya kerusuhan anti-Cina di Cikarang, peneliti juga ingin mengetahui interaksi antara Etnis Cina dengan Masyarakat Pribumi sebelum terjadi Kerusuhan Anti Etnis Cina. Kerusuhan di Cikarag terjadi karena adanya ketimpangan hasil ekonomi yang sebagian bear dikuasai oleh golongan minoritas, yakni Etnis Cina. Hal ini terjadi karena Pemerintahan Presiden Soeharto tidak memberikan akses lain selain kepada Etnis Cina. Kerusuhan yang terjadi merupakan akumulasi ketidakharmonisan antara Etnis Cina dengan masyarakat pribumi setempat karena kemampuan daya beli dan daya saing di bidang ekonomi. Karena peluang yang besar ini di bidang ekonomi menimbulkan kritik dan kebencian khususnya dari pesaing pribumi (Dawis, 2010: 32). Peristiwa Mei memperlihatkan bahwa orang Tionghoa tetap dianggap bagian

tatanan ras dan kebudayaan di Indonesia yang tidak diinginkan, meskipun terdapat upaya untuk membaurkan mereka ke dalam masyarakat Indonesia (Dawis, 2010: 35).

Adapun alasan yang menjadi landasan peneliti untuk mengkaji hal tersebut adalah: pertama, sebagai sebuah kajian dalam Sejarah Lokal yang berhubungan dengan sektor ekonomi yang bernuansa politik; kedua Cikarang merupakan sebuah daerah yang potensial bagi perekonomian di Kabupaten Bekasi yang mana terdapat Etnis Cina, juga menguasai perdagangan; ketiga, terbatasnya akses kegiatan Etnis Cina yang dilakukan Pemerintahan Presiden Soeharto menyebabkan Etnis Cina terkonsentrasi untuk melakukan kegiatan di sektor ekonomi, namun tetap saja mengakibatkan sentimen dengan Masyarakat Pribumi padahal dengan interaksi perdagangan dengan Pribumi, dapat terjalin suatu kerjasama.

Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Peristiwa 15 Mei 1998: Kerusuhan Anti-Etnis Cina Di Cikarang Menjelang Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto”**. Peristiwa Mei 1998 yang terjadi di Indonesia menjadi judul besar dalam penelitian ini karena pada hakekatnya kerusuhan di Cikarang berada dalam bingkai waktu yang sama. Sedangkan judul kecil sebagai penjabar dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kerusuhan terjadi dalam lingkup yang kecil yakni lingkup local yang terjadi di Cikarang. Peneliti dalam judul kecil juga mengganti istilah Orde Baru dengan Pemerintahan Presiden Soeharto karena hendak menghilangkan penamaan Orde Baru sebagai sebuah rezim, namun masa pemerintahan yang memimpinlah pada saat itu yang digunakan. Peneliti berharap dengan mengkaji penelitian ini masyarakat di

Indonesia tidak membeda-bedakan Etnis, terutama bagi masyarakat pribumi Cikarang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa pokok pemikiran yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah utama yang menjadi pembahasan dalam kajian penulisan, yaitu “Mengapa terjadi kerusuhan Anti-Etnis Cina di Cikarang tahun 1998?”. Agar permasalahan yang dikaji menjadi lebih jelas, peneliti akan memberikan batasan masalah tersebut ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana latar belakang terjadinya kerusuhan anti-Etnis Cina di Cikarang?
- b. Bagaimana proses terjadinya kerusuhan anti-Etnis Cina di Cikarang?
- c. Bagaimana dampak yang diakibatkan dari kerusuhan anti-Etnis Cina di Cikarang?
- d. Bagaimana upaya Etnis Cina dan Masyarakat Cikarang dalam mengupayakan konsolidasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal utama yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Sama halnya dengan penelitian ini, yang memiliki tujuan, yang mencakup dua aspek, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Maksud dari tujuan umum adalah untuk mendapatkan informasi dan pelajaran berharga dari peristiwa sejarah di masa lampau agar menjadi pijakan dalam melangkah ke masa depan, sedangkan tujuan khusus dalam penulisan ini adalah "*Peristiwa 15 Mei 1998: Kerusuhan Anti-Etnis Cina di Cikarang menjelang Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto*".

Dalam penulisan karya ilmiah ini, ada beberapa tujuan yang peneliti hendak capai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai latar belakang terjadinya Peristiwa Kerusuhan anti-Etnis Cina di Cikarang Tahun 1998, yang terdiri dari latar belakang umum dan latar belakang khusus. Selain itu, peneliti berupaya untuk memberikan gambaran hubungan antara Etnis Cina dengan Masyarakat setempat terutama Pribumi di Cikarang.
2. Menjelaskan terjadinya peristiwa kerusuhan anti-Etnis Cina di Cikarang tahun 1998. Kerusuhan anti-Etnis Cina yang terjadi akan dijelaskan oleh peneliti mulai dari awal mula kerusuhan hingga akibat-akibat yang ditimbulkan karena Kerusuhan Anti-Etnis Cina.

3. Menguraikan akibat yang terjadi karena Peristiwa Kerusuhan anti-Etnis Cina di Cikarang tahun 1998. Setelah kerusuhan terjadi, banyak akibat yang ditimbulkan. Peneliti akan menguraikan akibat-akibat yang terjadi, mulai dari kerusakan toko-toko hingga hubungan antara Etnis Cina dengan Masyarakat setempat di Cikarang.
4. Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Etnis Cina dan Masyarakat Cikarang dalam mengupayakan konsolidasi. Dalam penelitian ini akan dijelaskan pula upaya-upaya pasca-kerusuhan dalam konsolidasi dan perbaikan hubungan antara Etnis Cina dengan Masyarakat setempat di Cikarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah adanya penelitian mengenai “Peristiwa 15 Mei 1998: Kerusuhan Anti-Etnis Cina Di Cikarang Menjelang Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto”, antara lain:

1. Bagi Peneliti, Diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang dimiliki untuk ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah dalam kehidupan praktis.
2. Bagi, Masyarakat, Memberikan solusi bagi masyarakat Cikarang agar tidak terjadi kecemburuan sosial dengan Etnis Cina sebagai Minoritas – juga memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat Cikarang agar kerusuhan Mei 1998 tidak terjadi lagi.

3. Bagi Pemerintah Daerah, Menambah perspektif baru bahwa adanya suatu perubahan dalam pembangunan tidak semua berjalan lurus tetapi terdapat juga konflik-konflik lingkungan yang terjadi, misalnya konflik sosial dan kepentingan. Selain itu, adanya perhatian dari Pemerintah Daerah sehingga tidak adanya pembedaan terhadap Etnis Cina.
4. Bagi Pembelajaran Sejarah, sebagai sebuah bentuk dari kajian sejarah lokal, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan sejarah lokal sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Selain itu, siswa akan mengenal bagaimana proses dan perubahan yang terjadi di daerahnya (Mulyana dan Gunawan [Eds.], 2007: 231-232).

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Dalam mengkaji skripsi yang berjudul “Peristiwa 15 Mei 1998: Kerusuhan Anti-Etnis Cina Di Cikarang Menjelang Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto”, peneliti menggunakan metode historis, yaitu suatu proses pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau (Sjamsuddin, 2007: 17-19).

1. Heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan pembahasan mengenai “Peristiwa 15 Mei 1998: Kerusuhan Anti-Etnis Cina di Cikarang menjelang Berakhirnya Pemerintahan Presiden

Soeharto”. Di dalam Heuristik, peneliti mencoba mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dan sesuai dengan masalah yang akan diangkat oleh peneliti. Sumber-sumber tersebut berupa sumber lisan yakni berupa wawancara dengan narasumber yang menjadi saksi peristiwa yang mengetahui tentang Kerusuhan Anti-Etnis Cina; maupun sumber-sumber kepustakaan seperti Buku Menggugat Otoritarianisme di Asia Tenggara karya Editor Arief Heryanto dan Summit K. Mandal, Negara dan Etnis Cina karya Leo Suryadinata, Sosiologi Suatu Pengantar karya Soerjono Soekanto yang membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan sumber. Pengumpulan sumber lainnya berupa foto, gambar, arsip serta dokumentasi lainnya juga menjadi bagian dalam pencarian dan pengumpulan sumber. Selain itu, ada beberapa sumber buku lagi dan hasil *Browsing* melalui internet yang peneliti tidak dapat sebutkan satu-persatu.

2. Kritik, dilakukan setelah pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang didapat dalam Heuristik yakni langkah pertama. kritik atas sumber, yaitu dengan melakukan analisis terhadap sumber yang telah diperoleh apakah sesuai dengan masalah. Pada tahap ini, kritik yang dilakukan terbagi dua, Eksternal dan Internal. Kritik Eksternal ditujukan untuk menilai otentisitas sumber. Dalam Kritik Eksternal dipersoalkan bahan dan bentuk sumber, umur dan asal dokumen, kapan dibuat, dibuat oleh siapa, instansi apa, atau atas nama siapa. Dalam tahapan ini, penulis mencoba menilai sumber-sumber tersebut berdasarkan ketentuan dari Kritik Eksternal. Sedangkan Kritik Internal lebih ditujukan untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan

pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Pada bagian Kritik Internal ini, peneliti melakukan kritik atas sumber kepustakaan yakni dengan membandingkan isi dari satu penulis buku dengan yang lainnya, sedangkan kritik atas sumber lisan lebih ditujukan kepada isi dari yang telah diungkapkan oleh saksi peristiwa terhadap masalah, sehingga fakta-fakta yang diperoleh lebih valid untuk mendukung pembahasan yang akan dikaji.

3. Interpretasi, Tahap berikutnya adalah proses penafsiran dan penyusunan makna kata-kata yang diperoleh setelah proses Kritik Sumber dengan cara menghubungkan satu fakta dengan lainnya sehingga didapatkan gambaran yang jelas tentang “Peristiwa 15 Mei 1998: Kerusuhan Anti-Etnis Cina di Cikarang menjelang Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto”. Tahap ini diawali dengan melakukan penafsiran terhadap fakta yang berasal dari sumber tertulis maupun lisan yang telah melalui fase kritik. Peneliti menganalisis serta mengkaji fakta-fakta tersebut kemudian diinterpretasikan. Penginterpretasian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Di dalam Interpretasi juga terdapat eksplanasi yaitu penjelasan.
4. Historiografi, yaitu penulisan sejarah, yang merupakan tahap akhir dari metode penelitian sejarah. Historiografi merupakan proses penulisan yang utuh dan masuk akal atas interpretasi dan eksplanasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya mengenai “Peristiwa 15 Mei 1998: Kerusuhan Anti-Etnis Cina Di Cikarang Menjelang Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto” Setelah sumber-sumber ditemukan dianalisis, ditafsirkan, kemudian dituangkan dalam bentuk karya

ilmiah berbentuk skripsi yang sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia (Ismaun, 1992-131).

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penulisan dari skripsi ini yaitu dengan menggunakan Studi Literatur dan Wawancara.

1) Studi Literatur

Studi Literatur merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti dengan membaca berbagai sumber yang berhubungan, serta mengkaji sumber lain baik dari buku maupun arsip dan dokumentasi seperti Koran sezaman, yang membantu dalam menentukan landasan teori tentang permasalahan yang dikaji. Khususnya studi literatur tentang social-politik yang bernuansa ekonomis karena penelitian tentang “Peristiwa 15 Mei 1998: Kerusuhan Anti-Etnis Cina Di Cikarang Menjelang Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto” dikaji oleh peneliti berada pada ranah tersebut.

2) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (Soehartono, 2008: 67-68). Sebenarnya teknik ini menjadi alat penelitian yang penting di dalam ilmu-ilmu

sosial seperti antropologi sosial. Teknik wawancara semacam ini ternyata membantu di dalam penelitian sejarah meskipun harus mengembangkan sendiri pendekatannya yang berbeda dengan sumber-sumber tercatat (Sjamsuddin, 2007: 104). Teknik wawancara ini dilakukan untuk menjangkau informasi-informasi dari narasumber. Wawancara dimungkinkan dilakukan dalam penelitian ini, karena terbatasnya sumber tertulis, sehingga dalam sumber penelitian tentang “Peristiwa 15 Mei 1998: Kerusuhan Anti-Etnis Cina Di Cikarang Menjelang Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto” membutuhkan teknik wawancara untuk mempermudah mengumpulkan sumber.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan memahami penulisan ini, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti mengungkapkan mengenai Latar Belakang Masalah Penelitian, mengapa memilih tema ini. Pada bab ini juga memuat Rumusan Masalah yang akan dibahas, disertai dengan Pembatasan Masalah yang ditulis pada bagian selanjutnya yang bertujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas dari yang ditetapkan. Tujuan Penulisan juga berada dalam bab ini, yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan.

Bagian selanjutnya adalah Manfaat Penelitian, yang berisi harapan dengan adanya penelitian ini maka akan berguna bagi berbagai pihak. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data merupakan bagian berikutnya, di dalam metode penelitian terdapat cara atau teknik penelitian yakni Metode Heuristik yang terdiri atas Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Bagian terakhir dalam Bab I ini adalah Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II ini berisikan tentang penjabaran mengenai literature yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu mengemukakan penjelasan beberapa sumber kepustakaan yang menjadi rujukan serta relevan dengan permasalahan yang dibahas. Tinjauan Pustaka merupakan perangkat teoritis dalam berpikir yang berisi konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Etnis Cina, Kerusuhan dan Kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap Etnis Cina. Konsep-konsep yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti mengenai “Peristiwa 15 Mei 1998: Kerusuhan Anti-Etnis Cina Di Cikarang Menjelang Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto”.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab III berisi tentang metode atau cara-cara yang digunakan yakni metode Historis. Pada bab ini dijelaskan langkah-langkah serta teknik yang dilakukan dalam

penulisan skripsi ini. Ada enam langkah yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah (Sjamsuddin, 2007: 89). Keenam langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Memilih suatu topik yang sesuai;
- b. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik;
- c. Membuat catatan tentang itu apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung (misalnya dengan menggunakan *system cards*); sekarang dengan adanya fotokopi, komputer, internet menjadi lebih mudah dan membuat *system cards* “ketinggalan jaman.”
- d. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber);
- e. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya;
- f. Menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin.

Setelah poin a, sebelum menginjak ke poin b, ada baiknya dilakukan langkah-langkah tambahan yakni:

- a. Penyusunan rancangan penelitian;
- b. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing;
- c. Mengurus perizinan.

Bab IV Peristiwa 15 Mei 1998

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai penjelasan hasil penelitian yang berhubungan dengan Kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di Cikarang terutama latar belakang yang menjadi pemicu peristiwa tersebut. Pembahasan dari Bab IV ini mencakup latar belakang Kerusuhan Anti-Etnis Cina di Cikarang, Kerusuhan Anti-Etnis Cina hingga akibat yang terjadi karena Kerusuhan Anti-Etnis Cina di Cikarang. Pada bab ini pula dijelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Etnis Cina dan Masyarakat Setempat untuk melakukan konsolidasi dan menciptakan hubungan yang harmonis. Pembahasan dalam bab ini ditulis berdasarkan sumber tertulis maupun lisan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam urutan Metode Penelitian Sejarah

Bab V Kesimpulan

Pada bab ini berisi hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan kemudian diinterpretasi dan dieksplanasi oleh peneliti sehingga menjadi suatu bentuk Historiografi atau Pelukisan Sejarah. Peneliti mengambil suatu kesimpulan terhadap beberapa permasalahan yang diajukan sebelumnya yang dilakukan dengan menganalisis semua fakta dengan didukung oleh berbagai literatur yang telah dibaca.

